

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Sherlywati et al. (2017) UMKM merupakan sektor usaha yang mampu mengatasi permasalahan makroekonomi di Indonesia seperti penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi pada pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2008) definisi UMKM dibedakan menjadi tiga berdasarkan kriteria sebagai berikut : (a) Usaha Mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dengan kriteria memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah serta bangunan tempat berdirinya usaha dan hasil penjualan per tahun kurang dari Rp 300.000.000,-. (b) Usaha Kecil adalah usaha perdagangan yang dilakukan perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- namun tidak termasuk tanah dan bangunan serta hasil penjualan antara Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,- per tahun. (c) Usaha Menengah adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah beserta bangunan dan memiliki hasil penjualan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000,- per tahun.

Perkembangan UMKM yang semakin meningkat dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta mendorong

penyerapan tenaga kerja (Sherlywati et al., 2017). Kontribusi signifikan yang diberikan oleh UMKM mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tercatat didalam data Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 65,5 juta unit. Jumlah tersebut meningkat 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 sebanyak 64,2 juta unit. UMKM mampu mengatasi masalah makro seperti penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Jumlah UMKM pada awal tahun 2021 mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 % setara dengan 8.573,83 triliun rupiah.

Ditengah ketidakpastian kondisi perekonomian global akibat dampak dari berbagai permasalahan ekonomi serta politik yang tidak stabil membuat beberapa sektor ekonomi di Indonesia mengalami penurunan produktivitas, termasuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Meskipun begitu, UMKM memiliki peran yang cukup tangguh dan fleksibel dalam menghadapi kondisi dinamika ekonomi sehingga mampu membuat perekonomian Indonesia menempati kondisi stabil (Murdiyanto, 2012).

Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang ada. Sumber daya manusia yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan serta keterbatasan modal yang tersedia membuat UMKM menjadi kurang berkembang sehingga dikondisi globalisasi seperti saat ini membuat UMKM kurang mampu bersaing dengan produk asing. Untuk itu, diperlukannya kebijakan dari pemerintah untuk

memberikan perhatian bagi UMKM. Salah satu kebijakan yang dapat mendorong produktivitas UMKM yaitu dengan bantuan pembiayaan yang dilakukan pemerintah dengan lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan non bank yang menggunakan prinsip *win win solution* dengan tetap memperhatikan kemampuan pembayaran dari UMKM (ND, 2015).

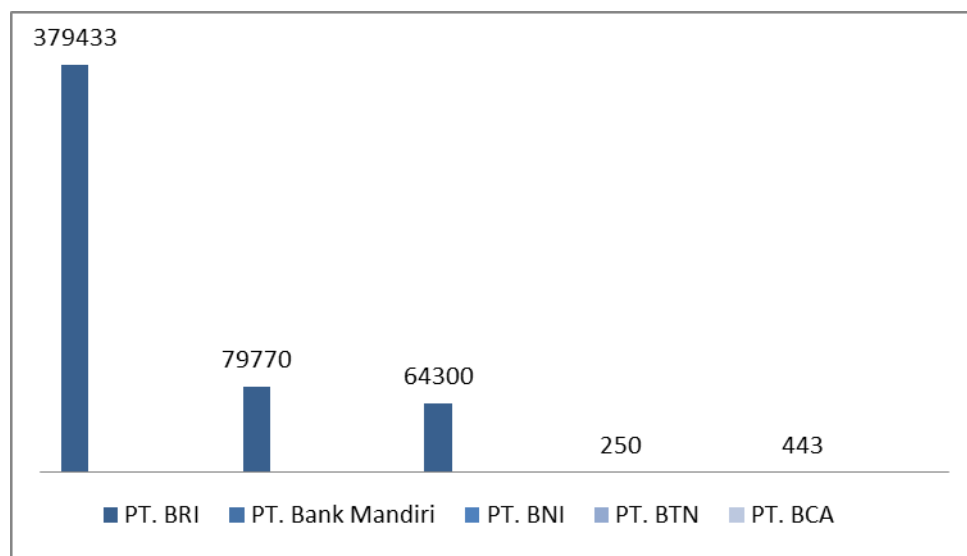
Kurangnya pengetahuan mengenai akses keuangan membuat UMKM sulit mendapatkan bantuan permodalan terutama lembaga keuangan formal (Kusuma, 2014). Setiap lembaga pembiayaan mempunyai syarat yang harus dipenuhi bagi nasabah, adapun syarat yang diberikan tidak sedikit. Seringkali pelaku UMKM merasa bahwa persyaratan tersebut rumit dan sulit dipenuhi seperti surat izin usaha. Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) tercatat bahwa dari total sekitar 60 juta UMKM pada awal tahun 2021 sekitar 77,6 persen tidak dapat menjangkau akses kredit perbankan maupun fintech. Lembaga pembiayaan enggan memberikan modal bagi UMKM karena UMKM memiliki aset yang terbatas untuk dijadikan sebagai jaminan.

Dalam upaya mengatasi masalah permodalan UMKM, pemerintah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program pembiayaan modal kerja atau kredit yang ditujukan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang memiliki usaha produktif namun memiliki akses pembiayaan perbankan terbatas (Hasanah & Priantina, 2017). Pembiayaan KUR disalurkan melalui lembaga keuangan dengan menggunakan pola penjaminan yang bertujuan untuk

memberikan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa memperkuat permodalan usaha dalam implementasi pelaksanaan kebijakan yang mempercepat pengembangan sektor riil dan memberdayakan UMKM. Program KUR diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 dengan sumber pendanaan dari perbankan atau lembaga keuangan lain yang ditetapkan sebagai penyalur KUR.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana berupa pinjaman (kredit). Bank turut serta dalam mendukung dan memperlancar perekonomian dalam memberikan pinjaman terhadap masyarakat yang membutuhkan dana (Hrp & Saraswati, 2020).

Gambar 1.1 Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR di Indonesia Berdasarkan 5 Penyalur Terbesar Selama Kurun Waktu Agustus 2015 s.d 30 Juni 2020 (dalam miliar rupiah)

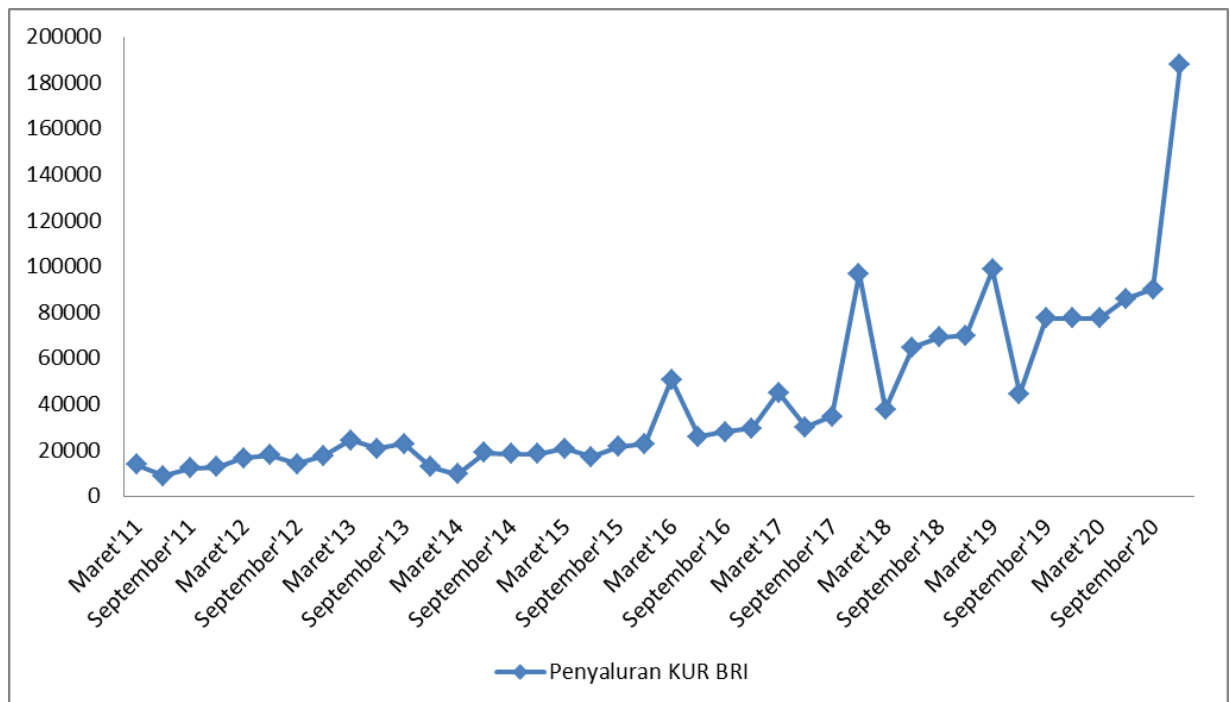


Sumber : Kredit Usaha Rakyat, 2021

Berdasarkan gambar 1.1 data perkembangan realisasi penyaluran KUR, terdapat 5 penyalur KUR terbesar di Indonesia selama kurun waktu Agustus 2015 sampai dengan 30 Juni 2020. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Indonesia dan telah menyalurkan KUR sebesar 379.433 miliar rupiah, penyalur terbesar kedua adalah Bank Mandiri yang menyalurkan KUR sebesar 79.770 miliar rupiah, ketiga adalah BNI telah menyalurkan KUR sebesar 64.300 miliar rupiah, kemudian penyalur terbesar keempat adalah BTN sebesar 250 miliar rupiah dan kelima adalah BCA yang telah menyalurkan KUR sebesar 443 miliar rupiah.

BRI telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar 188.110 miliar pada kuartal ke-IV tahun 2020. Permintaan KUR terbanyak dari sektor pertanian dan perdagangan. Dalam program KUR ini, para pengusaha mikro dapat mengajukan pinjaman di BRI dengan syarat dan proses yang telah ditetapkan. Penyaluran KUR mampu membantu pelaku UMKM untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi dan investasi sehingga dengan tetap berjalannya aktivitas ekonomi maka dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat (Prihartini & Dana, 2018).

Gambar 1.2 Grafik Fluktuasi Penyaluran KUR BRI di Indonesia Periode 2011-2020 (dalam miliar rupiah)



Sumber : Bank Rakyat Indonesia, 2021

Gambar 1.2 mengungkapkan bahwa selama kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu tahun 2011-2020 jumlah KUR yang disalurkan oleh BRI mengalami fluktuasi. Dapat diketahui bahwa pada Maret 2011 jumlah penyaluran KUR mencapai 13.700 miliar, namun mengalami penurunan pada September 2011 menjadi 8.690 miliar dan tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.770 miliar. Penyaluran KUR tertinggi terjadi pada Desember 2020 yaitu sebesar 188.110 miliar. Hal ini diakibatkan pelaku UMKM cukup kuat bertahan dalam gejolak perekonomian yang tidak menentu.

Meningkatnya volume penyaluran KUR dikarenakan jumlah UMKM mengalami peningkatan. Terjadinya peningkatan penyaluran KUR pada

sektor UMKM menunjukkan bahwa perbankan memiliki peran dalam mendukung UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan KUR ini juga diakibatkan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Program KUR dibentuk dengan tujuan membantu permodalan pelaku UMKM untuk terus melakukan produktivitas. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi terhadap bunga KUR dan terus melakukan sosialisasi agar program KUR dapat dijangkau oleh masyarakat luas dengan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Bank Indonesia telah menetapkan suku bunga acuan (BI-7DRR) untuk meningkatkan efektifitas dari transmisi kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga pasar uang dan perbankan. Instrumen kebijakan moneter ini menjadi patokan bagi penentuan suku bunga lainnya, salah satunya suku bunga perbankan. Suku bunga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pinjaman karena kenaikan suku bunga acuan akan mendorong kenaikan suku bunga lainnya termasuk suku bunga pinjaman maupun suku bunga deposito, begitu sebaliknya, apabila BI-7DRR turun maka suku bunga didalam perbankan juga relatif turun (Khotimah, 2019). Didalam memberikan pinjaman, bank membebankan bunga kepada nasabah sebagai bentuk pendapatan penggunaan jasa dari perbankan. Bunga merupakan pendapatan utama bagi bank, semakin tinggi pendapatan yang didapat melalui bunga maka semakin tinggi pendapatan bank sehingga bank dapat menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Namun, tingkat bunga yang tinggi

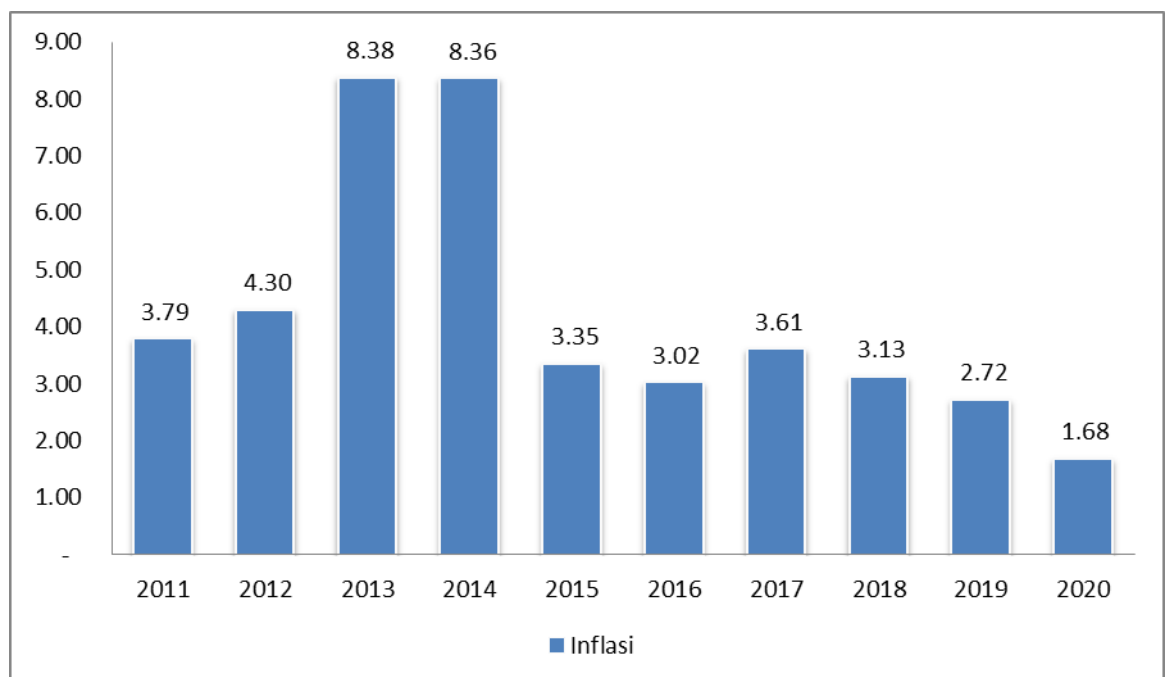
juga akan menyebabkan beban pembayaran kredit yang lebih tinggi pada masyarakat.

Pemerintah menetapkan subsidi dalam suku bunga KUR, artinya pemerintah akan menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh nasabah. Besarnya subsidi suku bunga ditetapkan oleh selisih antara tingkat bunga pinjaman dikurangi tingkat bunga yang ditanggung nasabah. Pada tahun 2018 BRI menetapkan besar suku bunga KUR sebesar 7%, namun pada tahun 2019 BRI menurunkan besar suku bunga KUR menjadi 6%, hal ini diikuti dengan meningkatnya jumlah KUR yang disalurkan kepada pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah bersama-sama dengan lembaga penyalur KUR ingin meningkatkan jumlah penyaluran KUR kepada pelaku UMKM.

Dalam perbankan terdapat rasio keuangan yang digunakan sebagai penentu kesehatan bank. Salah satunya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio pendapatan yang digunakan untuk melihat tingkat modal terhadap total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi risiko maka akan membuat *risk margin* semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan karena berpengaruh terhadap tingkat pendapatan operasional perusahaan (Barus & Lu, 2013). Bank Indonesia telah menetapkan besaran minimum CAR yang harus dijaga oleh bank-bank umum yaitu sebesar 8%, apabila bank umum memiliki CAR dibawah ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia maka bank tersebut diwajibkan untuk menambah besaran modal agar bank tetap likuid.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki beberapa permasalahan ekonomi yang krusial sehingga akan mempengaruhi sektor ekonomi. Salah satunya adalah inflasi. Khotimah (2019) menjelaskan bahwa inflasi dapat mempengaruhi penyaluran kredit. Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus menerus serta tidak hanya terjadi pada barang tertentu saja. Kenaikan tingkat inflasi menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produksi akan semakin tinggi sehingga dapat mempengaruhi produktivitas usaha (Hasanah & Priantina, 2017).

Gambar 1.3 Diagram Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2020 (dalam persen)



Sumber : Bank Indonesia, 2021

Pada gambar 1.3 perkembangan inflasi di Indonesia, diketahui pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Tahun 2012 inflasi mengalami kenaikan menjadi 4,30%. Kenaikan inflasi yang cukup signifikan terjadi pada tahun

2013 dan 2014 yaitu sebesar 8.36%. Penyebab utama tingginya inflasi adalah terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memberikan pengaruh terhadap harga bahan pangan. Pada tahun 2015 inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 3.35%. Hingga tahun 2020 inflasi di Indonesia cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa tingkat suku bunga acuan (BI-7DRR) menjadi penentu dalam memutuskan besarnya suku bunga kredit/pinjaman. BRI perlu memperhatikan besaran dari suku bunga kredit karena akan berdampak dalam keputusan masyarakat untuk mengambil kredit. Didalam program KUR, subsidi bunga dari pemerintah akan membuat beban bunga dalam pelunasan kredit oleh masyarakat menjadi ringan. Hal ini dapat membuat volume kredit yang disalurkan juga akan mengalami peningkatan. Bagi bank, kecukupan modal merupakan hal yang paling penting untuk kelangsungan likuiditas bank. Besaran minimum CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia perlu dijaga oleh bank karena digunakan untuk antisipasi bank dalam menampung risiko kerugian dana akibat kegiatan operasional. BRI mampu menjaga CAR sebesar 20,61% pada tahun 2020. Sehingga dalam kegiatan penyaluran dana untuk kredit BRI mampu menjaga kesehatan modalnya tetap likuid. Penyaluran KUR yang mengalami fluktuasi pada tahun 2011-2020 juga bisa saja diakibatkan karena kondisi inflasi di Indonesia yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang secara terus menerus sehingga volume penyaluran KUR menjadi tidak stabil.

BRI merupakan bank yang paling banyak menyalurkan KUR kepada pelaku UMKM di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana variabel independen yaitu tingkat suku bunga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan inflasi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penyaluran KUR. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subjek PT. Bank Rakyat Indonesia pada periode 2011-2020 dengan judul : **“PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA, *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN INFLASI TERHADAP PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI UMKM PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA DI INDONESIA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang terjadi, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut :

1. Apakah tingkat suku bunga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia?
2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia?

3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan inflasi secara simultan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, penelitian ini memberikan ruang lingkup masalah agar penelitian dapat dilakukan dengan terarah. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan faktor tingkat suku bunga KUR, CAR dan inflasi. Alasan menggunakan objek suku bunga, CAR dan inflasi yaitu karena faktor internal dan eksternal dapat mempengaruhi efektifitas penyaluran KUR yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan studi kasus dengan lingkup suku bunga, CAR dan inflasi terhadap penyaluran KUR bagi UMKM pada PT. Bank Rakyat Indonesia di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan tentang penyaluran KUR bagi UMKM.
2. Sebagai kontribusi teoritis yang dapat dijadikan bahan referensi yang berkaitan dengan pengaruh tingkat suku bunga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan inflasi terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun pertimbangan dalam keputusan penyaluran kredit khususnya bagi UMKM yang ada di Indonesia.